



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

**LAPORAN KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH**

KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2021

**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN ANGGARAN 2022**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan ini merupakan bagian dari yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sertadalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan dan penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Inspektur Kepada Bupati Mukomuko untuk melaksanakan kinerja organisasi Inspektorat Daerah yang berorientasi pada hasil, baik berupa **output** maupun **outcome** dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (**good governance**). Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dan kebijaksanaan dalam pengelolaan sumber daya yang ada, guna mewujudkan Sasaran, Visi dan Misi Inspektorat Daerah berdasarkan dokumen perencanaan yang dirumuskan sebelumnya dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026.

Capaian kinerja yang diperoleh pada Tahun 2021 ini tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama seluruh pihak, yaitu Masyarakat, Swasta dan Aparatur Pemerintah Daerah dengan semangat membangun untuk Kabupaten Mukomuko, baik bidang teknis maupun non teknis serta adanya dukungan dari stakeholders/mitra kerja.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 ini dapat bermanfaat dan sebagai bahan masukan

untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun, agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya sehingga dapat memberikan pelayanan prima yang transparan dan akuntabel bagi masyarakat.

Mukomuko, Januari 2022



APRIANSYAH, ST

Penghina Utama Muda. IV/C

NIP. 19730401 200604 1 003

EXECUTIVE SUMMARY

Penyajian Laporan Kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai. Tercapai atau tidaknya Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko dapat dilihat dari tercapai atau Tidaknya target pada Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama ditetapkan berdasarkan Sasaran Strategis yang mendukung Misi Bupati Mukomuko yakni, " Meningkatkan tata Kelola Pemerintah yang Baik, Transparan dan Akuntabel, Guna memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat".

Berdasarkan kondisi, potensi, permasalahan, peluang, dan dinamika pemerintahan, serta dengan memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam Visi Kabupaten Mukomuko, maka Visi Inspektorat Daerah adalah :

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mukomuko yang Maju, Mandiri, Berkarakter dan Sejahtera Berbasis Agro, Perikanan dan Berilmu Pengetahuan & Teknologi (IPTEK) serta Beriman dan Bertaqwa (IMTAQ)".

Untuk mencapai Visi tersebut maka dituangkan dalam Misi Inspektorat Daerah, yaitu :

"Menjalankan Pemerintahan yang Profesional, Amanah dan Transparan"

Tujuan yang terkait dengan misi Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko adalah:

- 1.Meningkatnya Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel
- 2.Meningkatnya Manajemen Kinerja
- 3.Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima

Selanjutnya untuk mencapai hasil yang optimal, maka Inspektorat Daerah

Kabupaten Mukomuko merumuskan Sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelaporan Keuangan Daerah
2. Meningkatnya Disiplin Aparatur
3. Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur
4. Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja

Hasil Penilaian atas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Ringkasan Capaian Kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah dalam Menindaklanjuti Temuan Pemeriksaan	Persentase TL APIP	50	50
	Persentase TL BPK	70	70
	Persentase TL Inspektorat Provinsi	90	90
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	Persentase Temuan Berulang	-	-
Meningkatnya Persentase Kasus Pengaduan dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang tertangani	Persentase Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	60	60
Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pada SAKIP Daerah	Nilai Komponen Evaluasi Internal pada SAKIP Daerah	6,68	6,68

Dikarenakan Tahun 2021 merupakan tahun ayal RPJMD maka seluruh target dapat tercapai dikarenakan penyesuaian target pada tahun awal RPJMD dan Renstra PD.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
EXECUTIVE SUMMARY	Iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	Viii
DAFTAR TABLE	Ix
BAB. I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan.....	3
D. Gambaran Umum Inspektorat Daerah.....	4
E. Tugas Pokok dan Fungsi	8
F. Isu-isu Strategis	12
G. Sistematika Penyusunan	12
BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	14
A. Gambaran Umum Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Tahun 2017-2021.....	14
B. Perencanaan Kinerja Tahun 2021	18
C. Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2021 ..	19
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2021.....	20
B. Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Tahun 2021.....	22
C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021.....	23
D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2020.....	24
BAB. IV PENUTUP	30

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran-1 Indikator Kinerja Utama Inspektorat daerah
Kabupaten Mukomuko
- Lampiran-2 Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah
Kabupaten Mukomuko Tahun 2021
- Lampiran-3 Rincian Realisasi Anggaran Per Kegiatan
- Lampiran-3 Evaluasi capaian program/kegiatan
Tahun 2016 -2020



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah PNS, CPNS dan Tenaga Kontrak Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021	4
Tabel 1.2 Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021.....	5
Tabel 1.3 Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2021	5
Tabel 1.4 Data Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan Tahun 2021	6
Tabel 1.5 Data Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko berdasarkan Eselonering Tahun 2021	6
Tabel 1.6 Data Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi Tahun 2021	7
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko	18
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2021	19
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2021	20
Tabel 3.2 Rincian Realisasi Anggaran Per Program Kegiatan	22
Tabel 3.3 Rincian Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis	23
Tabel 3.4 Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten mukomuko Tahun 2016 -2020	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan “Good Governance” diperlukan suatu akuntabilitas terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh suatu instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan bahwa Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Inspektorat Daerah sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah, yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Tahun 2016-2021. Oleh karena itu, Inspektur Daerah bertanggung jawab untuk menyusun Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko. Laporan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban Inspektur Daerah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya yang diamanahkan berdasarkan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah yang telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang melandasi Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 mengacu pada peraturan perundang-undangan, yakni sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor10);

C. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Laporan Kinerja ini berisikan Ikhtisar Capaian Penetapan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 terhadap Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko. Pencapaian Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko tersebut disajikan berupa informasi mengenai Realisasi Pencapaian terhadap Sasaran Strategis Renstra, Realisasi Capaian Indikator Output dan

Outcome seluruh Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021, disertai dengan penjelasan atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja dengan tahun sebelumnya. Selain itu dalam Laporan Kinerja Inspektorat Daerah ini menyajikan Realisasi terhadap anggaran kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2021.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko tahun 2021 adalah sebagai laporan pertanggungjawaban Inspektur Daerah Kabupaten Mukomuko kepada Bupati Mukomuko terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

D. Gambaran Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko

Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Mukomuko, pada tahun 2021 didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 45 orang terdiri atas PNS sebanyak 41 orang, CPNS sebanyak 3 orang dan Tenaga Kerja Kontrak 1 Orang.

Tabel 1.1
Jumlah PNS, CPNS dan Tenaga Kerja Kontrak
Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021

NO	URAIAN	JUMLAH
1	PNS	41
2	CPNS	3
3	TENAGA KERJA KONTRAK	1
JUMLAH		45

Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko berdasarkan Tingkat Pendidikan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 1.2
Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

NO	URAIAN	JUMLAH
1	SMA	2
2	STRATA I	38
3	STRATA II	5
JUMLAH		45

Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Berdasarkan Tingkat Golongan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1.3
Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2021

NO	GOLONGAN	STATUS KEPEGAWAIAN		JUMLAH	%
		PNS	CPNS		
1	Golongan I	-		-	0
2	Golongan II	2		2	4,87
3	Golongan III	31	3	34	75,60
4	Golongan IV	8		8	19,51
JUMLAH		41	3	44	100,00

Jumlah pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko berdasarkan Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan pada Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4
Data Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Telah Mengikuti
Diklat Kepemimpinan Sampai Tahun 2021

NO	TINGKAT DIKLAT PIM	JUMLAH
1	PIMI	-
2	PIM II	1
3	PIM III	8
4	PIM IV	4
JUMLAH		13

Jumlah pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Berdasarkan Eselonering pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.5
Data Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Berdasarkan
Eselonering Tahun 2021

NO	TINGKAT ESELON	JUMLAH
1	Eselon I.a	-
2	Eselon II.a	-
3	Eselon II.b	1
4	Eselon III.a	5
5	Eselon III.b	-
6	Eselon IV.a	3
7	Eselon IV.b	-
JUMLAH		9

Tabel 1.5
Data Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Berdasarkan
Eselonering Tahun 2021

NO	DATA AUDITOR (P2UPD/JFA)	JUMLAH
1	JFA Madya	-
2	JFA Muda	3
3	JFA Pertama	9
4	P2UPD Madya	3
5	P2UPD Muda	3
6	P2UPD Pertama	3
JUMLAH		21

Disamping dukungan sumber daya manusia, Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko memiliki sarana dan prasarana. Data Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.6
Data Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko
Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi Tahun 2021

No	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
Kendaraan Roda 4 (Empat)					
1.	Innova (Dex)	1	1	-	-
2.	Innova	1	-	-	1
3.	Hilux Double Cabin	1	-	1	-
4.	APV	1	-	-	1
5.	RUSH	1	-	-	1
JUMLAH		5	1	1	3
Kendaraan Roda 2 (Dua)					
1.	Supra Fit - thn 2005	6	6	-	-
2.	Mega Pro	3	3	-	-
JUMLAH		14	10	1	3

E. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko dan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko dan dipimpin oleh seorang Inspektur Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut:

1. Inspektur
 2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Analisis dan evaluasi
 - c. Sub Bagian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 3. Inspektur Pembantu Wilayah I
 4. Inspektur Pembantu Wilayah II
 5. Inspektur Pembantu Wilayah III
 6. Inspektur Pembantu Wilayah IV
 7. Kelompok Jabatan Fungsional
- 1) Inspektur mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
 - b. Pelaksanaan pengawasan Internasional terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. Melaksanakan pengawasan dengan tujuan tertentu
 - d. Menyusun laporan hasil pengawasan

- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah
 - f. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat dan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Mengkoordinir perumusan Rencana Program kerja dan Anggaran Pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
 - b. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - 1. Sub Bagian Perencanaan

Sub bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerja sama pengawasan dan dokumentasi, mempunyai fungsi sebagai berikut:

 - a. Pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah
 - b. Pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan
 - c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-dokumentasi hukum;
 - d. Koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegakan Hukum.

2. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan. Mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi hasil pengawasan;
- b. Koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
- c. Penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- d. Mendokumentasi hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah.

3. Sub Bagian administrasi umum dan keuangan

mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan. Mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- b. Pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat
- c. Pelaksanaan urusan perlengkapan;
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- f. Pelaksanaan perbendaharaan;
- g. Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan.

- 3). Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
 - b. Perencanaan Program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - d. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
 - e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang perangkat daerah;
 - f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - g. Kerja sama pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - h. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - i. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - j. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan.
- 4). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko berikut ini:

F. Isu – Isu Strategis

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi Isu Strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

- a. Adanya tuntutan masyarakat terhadap kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko agar lebih profesional.
- b. Banyaknya perangkat daerah dan desa yang harus diawasi serta luas wilayah Kabupaten Mukomuko.
- c. Masih kurangnya penerapan akuntabilitas kinerja oleh perangkat daerah terutama dalam penyusunan laporan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah.
- d. Belum optimalnya penyelesaian temuan hasil audit oleh auditor.
- e. Penambahan penugasan atas pengawasan penanganan Pandemi Covid-19.

G. Sistematika Penyusunan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2018 dengan Sistematika penulisan sebagai berikut:

Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

B. Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 -2021

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko tahun 2021-2026 merupakan Dokumen Perencanaan Strategis yang disusun dan dirumuskan setiap 5 (lima) tahun, yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko. Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

1. Pernyataan Visi

Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko sebagai organisasi perangkat daerah, yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Mukomuko yaitu: "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mukomuko yang Maju, Mandiri, Berkarakter dan Sejahtera Berbasis Agro, Perikanan dan Berilmu Pengetahuan & Teknologi (IPTEK) serta Beriman dan Bertaqwa (IMTAQ)" sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mukomuko tahun 2021-2026.

Untuk menunjang Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Mukomuko, maka rumusan Visi yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko 2021-2026 adalah **"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mukomuko yang Maju, Mandiri, Berkarakter dan Sejahtera Berbasis Agro, Perikanan dan Berilmu Pengetahuan & Teknologi (IPTEK) serta Beriman dan Bertaqwa (IMTAQ)"**



2. Pernyataan Misi

Untuk merealisasikan Visi Inspektorat Daerah yang telah ditetapkan maka Misi Inspektorat Daerah adalah **Menjalankan Pemerintahan yang Profesional, Amanah dan Transparan**

3. Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan Visi dan Misi Inspektorat Daerah kabupaten Mukomuko tersebut diatas, maka melalui tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Mukomuko diharapkan dapat diketahui kinerja apa yang diharapkan dapat terwujud.

Tujuan yang terkait dengan misi Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko adalah:

1. Meningkatnya Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel
2. Meningkatnya Manajemen Kinerja
3. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima

Selanjutnya untuk mencapai hasil yang optimal, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko merumuskan Sasaran sebagai berikut:

5. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelaporan Keuangan Daerah
6. Meningkatnya Disiplin Aparatur
7. Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur
8. Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja

4. Indikator Kinerja Utama

Setiap program dan kegiatan dalam Renstra selanjutnya dinyatakan dalam suatu indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. Hanya dengan indikator kinerja yang memenuhi kualitatif tersebut keberhasilan pencapaian program dan kegiatan akan dapat dilakukan. Keberhasilan program diukur dengan indikator hasil (outcome), sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (Output). Penetapan indikator program dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut.

Indikator kinerja Utama Inspektorat Daerah merupakan Indikator Kinerja outcome, yang menunjukkan peran Inspektorat dalam Pengendalian Dan Pengawasan Internal, Tata Kelola Pelaporan Keuangan, dan Pelaporan Kinerja. Indikator Kinerja Utama digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (Output). Berikut Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko.

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pada SAKIP Daerah	Nilai komponen evaluasi internal
Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti temuan pemeriksaan	Persentase Tindak Lanjut Temuan APIP
	Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK
	Persentase Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Propinsi
Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Internal	Penurunan Persentase Temuan Berulang
Meningkatnya Persentase Kasus Pengaduan dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang tertangani	Persentase Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
Meningkatnya Nilai Pada Area Intervensi APIP dan Sub Indikator Pengawasan Pada 8 Area Intervensi MCP	Nilai Pada Area Intervensi APIP dan Sub Indikator Pengawasan Pada 8 Area Intervensi MCP

Rincian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko disajikan pada Lampiran-1.

C. Perencanaan Kinerja Tahun 2021

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan jangka menengah sebagaimana yang diuraikan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026, disusunlah Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran dan Target Kinerja. Indikator Kinerja berisi tentang Output dan Outcome yang ingin dicapai dalam mewujudkan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Kualitas Evaluasi pada SAKIP Daerah	Nilai Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	7
Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti temuan pemeriksaan	Persentase tindak lanjut Temuan APIP	50 %
	Persentase tindak lanjut Temuan BPK	70 %
	Persentase tindak lanjut Temuan Inspektorat Provinsi	90 %
Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Internal	Penurunan Persenyase Temuan Berulang	80 %
Meningkatnya Persentase kasus pengaduan dan pengawasan dengan tujuan tertentu yang tertangani	Persentase penanganan kasus pengaduan masyarakat dan pengawasan dengan tujuan tertentu	60 %
Meningkatnya Nilai pada Area intervensi APIP dan Sub Indikator Pengawasan pada 8 Area Intervensi MCP	Nilai pada Area intervensi APIP dan Sub Indikator Pengawasan pada 8 Area Intervensi MCP	40

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2021

Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko bertugas untuk mendukung pembangunan jangka menengah Kabupaten Mukomuko, Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko berperan dalam Misi ke III yaitu Menjalankan Pemerintahan Yang Profesional, Amanah dan Transparan.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah dalam Menindaklanjuti Temuan Pemeriksaan	Persentase TL APIP	50	50
	Persentase TL BPK	70	70
	Persentase TL Inspektorat Provinsi	90	90
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal Meningkatkan Persentase Kasus Pengaduan dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang tertangani	Persentase Temuan Berulang	-	-
	Persentase Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	60	60
Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pada SAKIP Daerah	Nilai Komponen Evaluasi Internal pada SAKIP Daerah	6,68	6,68

Penjelasan Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah dalam Menindaklanjuti Temuan Pemeriksaan

Indikator Kinerja Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah dalam Menindaklanjuti Temuan Pemeriksaan dapat dilihat dari persentase tindak lanjut atau penyelesaian temuan pemeriksaan baik temuan dari BPK, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Daerah kabupaten Mukomuko, dikarenakan tahun 2021 merupakan kondisi awal penetapan RPJMD dan Renstra inspektorat Kabupaten Mukomuko target dapat terpenuhi.

2. Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Internal

Indikator Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Internal dapat dilihat dari Presentase terjadinya temuan berulang atau temuan yang sama secara berulang, dikarenakan tahun 2021 merupakan kondisi awal penetapan RPJMD dan Renstra Inspektorat Kabupaten Mukomuko target belum ditetapkan sehingga pengukuran dilakuna pada tahun sebelumnya.

3. Meningkatnya Persentase Kasus Pengaduan dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang tertangani

Indikator Meningkatnya Persentase Kasus Pengaduan dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang tertangani dapat dilihat dari jumlah penanganan/penyelesaian kasus atau pengaduan yang masuk ke inspektorat dikarenakan tahun 2021 merupakan kondisi awal penetapan RPJMD dan Renstra Inspektorat Kabupaten Mukomuko maka teraget dapat terealisasi sesuai dengan table diatas.

4. Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pada SAKIP Daerah

Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pada SAKIP Daerah Nilai

Komponen Evaluasi Internal pada SAKIP Daerah dapat dilihat dari Nilai Komponen Evaluasi Internal pada SAKIP Daerah dikarenakan tahun 2021 merupakan kondisi awal penetapan RPJMD dan Renstra Inspektorat Kabupaten Mukomuko maka teraget dapat terealisasi sesuai dengan table diatas.

B. Realisasi Anggaran 2021

Realisasi anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 yakni sebesar 93,62 % dari pagu anggaran. Berikut rincian realisasi anggaran per program.

Tabel 3.2
Rincian Realisasi Anggaran Per Program

Program	Pagu	Realisasi	%
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko	696.257.098,00	678.515.104,00	95
Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.952.354.500,00	1.840.093.324,00	96,17
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	357.387.845,00	327.902.265,00	93,73
Total	3.005.999.443,00	2.814.241.443,00	93,62

Tabel 3.3
Rincian Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis & Program

Sasaran : Meningkatnya tata kelola kinerja Perangkat Daerah			
Program	Pagu	Realisasi	(%)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko	696.257.098,00	678.515.104,00	95
Sasaran 1 : Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah dalam Menindaklanjuti Temuan Pemeriksaan			
Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Internal			
Sasaran 3: Meningkatnya Persentase Kasus Pengaduan dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang tertangani			
Sasaran 4: Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pada SAKIP Daerah			
Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.952.354.500,00	1.840.093.324,00	96,17
Sasaran : Meningkatnya tata kelola kinerja Perangkat Daerah			
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	357.387.845,00	327.902.265,00	93,73

Rincian Realisasi Anggaran per kegiatan disajikan pada lampiran-4

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan 2021

Secara keseluruhan dapat dinyatakan bahwa terdapat peningkatan kinerja jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dapat dilihat dari Indikator Kinerja Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) telah terjadi peningkatan nilai dari tahun sebelumnya yakni dari level 2+ menjadi level 3, telah mencapai target sesuai dengan yang diharapkan yakni menjadi level 3. Pada presentase tindak lanjut hasil pemeriksaan juga terdapat

peningkatan dari tahun 2020 sebanyak 68,2% pada tahun 2021 sebanyak 70%.

D. Capaian Kinerja Inspektorat tahun 2016 s/d 2020

Dikarenakan tahun 2021 merupakan kondisi awal renstra tahun 2021 – 2026 maka belum dapat diukur capainnya sehingga kami menyajikan capaian renstra periode sebelumnya yang tahun 2016 - 2020.

Dalam penjelasan table dibawah masih terdapat Indikator kinerja yang belum tercapai dikarenakan luasnya cakupan pekerjaan yang dibebankan kepada Inspektorat dan beberapa penyebab yang lain sebagai berikut Capaian Kinerja yang tidak tercapai disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kesadaran Perangkat Daerah dalam memenuhi dokumen yang dibutuhkan untuk evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP
2. Masih Kurangnya Kesadaran Perangkat Daerah Untuk meindaklanjuti Temuan Hasil Pemeriksaan.
3. Kurangnya Kesadaran Perangkat daerah untuk menerapkan pengendalian Intern.
4. Keterbatasan Anggaran, waktu dan sumber daya dalam pelaksanaan tugas pengawasan

Rangkuman capain tersebut dapat dilihat pada table berikut :

TABLE 3.3
CAPAIAN IKU INSPEKTORAT TAHUN 2016 – 2020

NO	SASARANI STRATEGIS	IKU	TARGET					REALISASI				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas tata kelola pemerintahan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, Inspektorat Propinsi dan Inspektorat Daerah Kabupaten yang ditindak lanjuti	-			100%	100%	-			67,90%	67,90%
		Jumlah dokumen Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)		1	1	1	1		1	1	1	1
		Persentase OPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal katagori B	-			58%	58%				75%	41%
		Perolehan Opini BPK atas penyajian LKPD		WDP	WTP	WTP	WTP		WTP	WTP	WTP	WTP
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Inspektorat	Kapabilitas APIP level 3			2	2+	3			2	2	2+
		Tingkat Maturnitas SPIP level 3			2	2	2			-	1,871	1,871

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja merupakan media pertanggungjawaban Inspektur dalam melaksanakan program kegiatan yang telah dilakukan, Untuk mendukung Misi Bupati “**Menjalankan Pemerintahan Yang Profesional, Amanah dan Transparan**”, dengan sasaran :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah dalam Menindaklanjuti Temuan Pemeriksaan	Persentase TL APIP	<i>50</i>	<i>50</i>
	Persentase TL BPK	<i>70</i>	<i>70</i>
	Persentase TL Inspektorat Provinsi	<i>90</i>	<i>90</i>
Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Internal	Persentase Temuan Berulang	-	-
Meningkatnya Persentase Kasus Pengaduan dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang bertanggung	Persentase Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	<i>60</i>	<i>60</i>
Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pada SAKIP Daerah	Nilai Komponen Evaluasi Internal pada SAKIP Daerah	<i>6,68</i>	<i>6,68</i>

Kinerja Inspektorat Daerah dikatakan berhasil apabila dari seluruh indikator kinerja yang ditetapkan telah mencapai target, dikarenakan tahun 2021 merupakan Tahun awal renstra 2021-2026 untuk itu keseluruhan target dapat terealisasi 100%. Untuk itu pada Laporan Angkutabilitas Kinerja Tahun 2021 ini kami juga menyajikan capan renstra tahun sebelumnya yakni tahun 2016-2021 yang tertuang pada BAB III laporan ini.

Semoga tahun ini (2022) seluruh target yang telah ditetapkan dapat terlaksana dan terealisasi dengan baik. Demikian laporan ini kami sampaikan semoga penyajian laporan ini dapat menjelaskan pelaksanaan dan pencapaian kinerja Inspektorat Tahun 2021.





LAMPIRAN

EVALUASI
Pencapaian Kinerja Tahun 2016- 2020

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Inspektorat Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Jumlah Penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	12	1068	500	500	500	12	1068	500	500	500	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	Jangka waktu Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	12 Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 item	-	15	3	3	3	-	15	3	3	3	0%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12 Bulan	12	-	-	-	-	12	-	-	-	-	100,00%	0%	0%	0%	0%
5	Jumlah penerima jasa administrasi keuangan	13 orang	12	13	10	14	14	12	13	10	14	14	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6	Jumlah penerima jasa kebersihan kantor	3 orang	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	10 item	12	10	10	10	10	12	10	10	10	10	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
8	Jumlah penyediaan barang cetakan dan pengadaan	3 item	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
9	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 item	12	5	5	5	5	8	5	5	5	5	66,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

10	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	4 item	144	4	4	3	3	144	4	4	3	2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	66,67%
11	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	7 item	12	7	6	6	6	12	7	6	6	6	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
12	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	39 ok	45	39	42	42	42	45	54	42	42	42	100,00%	138,46%	100,00%	100,00%	100,00%
13	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	155 ok	111	155	40	172	172	111	155	40	172	172	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
14	Jumlah penerima jasa kantor	7 orang	-	7	5	4	4	-	5	5	4	4	0%	71,43%	100,00%	100,00%	100,00%
15	Jumlah pelaksanaan justifikasi serah terima belanja modal seluruh SKPD ke Bupati Mukomuko	1 kali	1	-	2	-	-	1	-	2	-	-	23%	0%	100,00%	0%	0%
16	Terlaksananya Pembangunan Gedung/Ruang Auditor dan Ruang Pemeriksaan	1 unit	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	92%	0%	0%	0%	0%
17	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	4 item	-	4	3	3	3	-	4	3	3	3	0%	100%	100%	100%	100,00%
18	Jumlah meubeler	3 item	30	3	-	3	3	26	3	-	3	2	87%	100%	0%	100%	66,67%
19	Realisasi Pengadaan Peralatan penunjang kinerja Aparatur Pengawasan	7 unit	7	-	-	-	-	6	-	-	-	-	85%	0%	0%	0%	0%
20	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Unit	-	1	-	1	1	-	1	-	1	1	0%	100%	0%	100%	100,00%

21	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas/Operasional	2 item	12	2	2	2	2	2	12	2	2	2	2	0%	100%	100%	100%	100,00%
22	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	5 item	12	5	3	4	4	12	5	3	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	
23	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD yang diReview	5 Dokumen	-	-	5	5	5	-	-	5	5	5	0%	0%	100%	100%	100%	
24	Jumlah Dokumen Penyerapan Anggaran dan Review Tender Pra DIPA	1 Dokumen	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	0%	0%	100%	0%	100%	
25	Jumlah RKA SKPD yang di Review	40 SKPD	43	40	-	-	-	16	40	-	-	-	37%	100%	0%	0%	0%	
26	Jumlah dokumen Pengadaan Barang & Jasa dan dana Desa	1 Dokumen	-	1	-	5	-	-	1	-	5	-	0%	100%	0%	100%	0%	
27	Jumlah Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	7 kali	7	7	320	7	7	6	7	320	7	7	86%	100%	100%	100%	100%	
28	Jumlah Kasus yang terselesaikan	20 kasus	-	20	20	10	10	-	20	20	9	9	0%	100%	100%	90%	90%	
29	Jumlah PD yang Konsultasi	20 PD	-	-	20	20	20	-	-	-	20	20	0%	0%	0%	100%	100%	
30	Level APIP	Level 3	-	-	1	3	3	-	-	1	3	3	0%	0%	100%	100%	100%	
31	Jumlah Dokumen Koordinasi TP4D	1 Dokumen	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	0%	0%	100%	100%	100%	
32	Jumlah Dokumen Inventarisasi Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	3 dokumen	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	68%	100%	100%	100%	100%	
33	Jumlah Penanganan pengaduan melalui Whistleblowing System dalam PBJ	5 pengaduan	-	-	5	5	5	-	-	5	5	5	0%	0%	100%	100%	100%	

34	Jumlah Dokumen Evaluasi PMPRB Kab.Mukomuko	1 Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	96%	100%	100%	100%	100%
35	Jumlah Dokumen Evaluasi SPI PD	1 Dokumen	10	-	1	1	1	-	-	1	1	1	0%	0%	100%	100%	100%
36	Jumlah Penyelenggaraan Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko yang Terdata Harta Kekayaannya	25 ASN	-	-	25	20	20	-	-	25	20	20	0%	0%	100%	100%	100%
37	Jumlah PNS/ASN yang terdata Harta Kekayaannya	600 PNS	306	600	200	200	200	288	600	200	200	200	94%	100%	100%	100%	100%
38	jumlah pengiriman PNS tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan	5 kali	5	5	4	5	5	4	9	4	5	5	80%	180%	100%	100%	100%
39	Jumlah Pengiriman ASN	9 orang	-	-	9	-	-	-	-	9	-	-	0%	0%	100%	0%	0%
40	Jumlah dokumen PAK Auditor	12 dokumen	-	12	2	12	12	-	12	2	12	12	0%	100%	100%	100%	100%
41	Jumlah pelaksanaan pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	1 kali	-	1	5	5	5	-	1	5	5	5	0%	100%	100%	100%	100%
42	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi yang Lebih Komprehensif	1 kali	1	-	1	1	1	1	-	1	1	1	97%	0%	100%	100%	100%
43	Jumlah Dokumen Catatan hasil Reviu DAK Fisik	15 dokumen	-	-	-	-	15	-	-	-	-	15	0%	0%	0%	0%	100%
44	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi	1 laporan	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	0%	0%	0%	0%	100%

45	Jumlah Dokumen Sistem dan Prosedur Pengawasan	1 Dokumen	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	0%	0%	100%	100%	100%
46	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar	4 dokumen	-	-	1	4	4	-	-	1	4	4	0%	0%	100%	100%	100%
47	Jumlah Laporan Pengendalian dan Penanganan Gratifikasi	3 Dokumen	-	-	3	3	3	-	-	3	3	3	0%	0%	100%	100%	100%
48	Jumlah Laporan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	16 laporan	16		3	10	10	16	-	3	7	7	100%	0%	100%	70%	70%
49	jumlah dokumen perencanaan Renstra, Renja, Lakip, Laporan Tahunan dan IKM	3 Dokumen	6	3	2	2	2	6	3	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%
50	Jumlah Dokumen Naskah Akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	1 Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	34%	100%	100%	100%	100%
51	Jumlah dokumen review LAKIPDA	1 dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
52	Penyusunan laporan kinerja & perjanjian Kinerja	2 dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%
53	Jumlah Dokumen Evaluasi LAKIP SKPD	42 dokumen	26	42	39	39	39	26	42	39	39	39	100%	100%	100%	100%	100%
54	Jumlah Dokumen Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 dokumen	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%

**LAMPIRAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
TAHUN 2021**

No	SASARAN STRATEGIS	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)					KEUANGAN			Ket
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	CAPAIN (100%)	Pagu	Realisasi	CAPAIN (100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	6.01	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						7,643,899,443	7,101,703,058	92.9	
1.	Meningkatnya tata kelola kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						5,334,157,098	4,933,707,469	92.5	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						25,125,000	22,958,000	91.4	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	100	12,580,000	12,580,000	100.0	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Dokumen	2	2	100	12,545,000	10,378,000	100.0	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4,652,300,000	4,301,861,615	92.5	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Orang	47	47	100	4,506,460,000	4,157,671,615	92.3	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pegawai yang melakukan Penatausahaan, pengujian/Verifikasi Keuangan	Orang	11	11	100	145,840,000	144,190,000	98.9	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						100,000,000	75,314,868	10.0	

No	SASARAN SRATEGIS	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)					KEUANGAN			Ket
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	CAPAIN (100%)	Pagu	Realisasi	CAPAIN (100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	10	11	110	100,000,000	75,314,868	10.0	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						277,477,324	275,381,436	99.2	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	5	5	100	6,999,603	6,998,763	100.0	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	10	10	100	26,998,455	26,934,896	99.8	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis	3	3	100	7,999,932	7,999,545	100.0	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis	3	3	100	29,999,880	29,996,940	100.0	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis	2	2	100	18,999,500	18,998,500	100.0	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis Pelayanan fasilitasi kunjungan tamu	Jenis	6	6	100	24,967,954	24,967,144	100.0	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kali	214	214	100	161,512,000	159,485,648	98.7	
			Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah								

No	SASARAN SRATEGIS	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)					KEUANGAN			Ket
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	CAPAIN (100%)	Pagu	Realisasi	CAPAIN (100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						49,999,774	32,269,250	64.5	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis	3	2	67	49,999,774	32,269,250	64.5	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						156,710,000	153,391,026	97.9	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai	Lembar	250	250	100	2,250,000	2,250,000	100.0	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu pembiayaan untuk penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	100	55,060,000	51,741,026	94.0	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Orang Pelayanan Jasa Umum yang mendapatkan Honorarium	Orang	10	10	100	99,400,000	99,400,000	100.0	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						72,545,000	72,531,274	100.0	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang mendapatkan Pemeliharaan dan pajak yang dibayar	Jenis	2	2	100	64,545,000	64,531,274	100.0	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang mendapat Pemeliharaan	Jenis	4	4	100	8,000,000	8,000,000	100.0	

No	SASARAN SRATEGIS	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)					KEUANGAN			Ket
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	CAPAIN (100%)	Pagu	Realisasi	CAPAIN (100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah dalam Menindaklanjuti Temuan Pemeriksaan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						1,952,354,500	1,840,093,324	94.2	
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal						1,471,920,500	1,467,731,224	100.0	
2	Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	4	4	100	131,025,000	130,732,600	100.0	
			Jumlah Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Sakip Pemerintah Daerah								
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	162	152	94	436,555,500	436,554,500	100.0	
3	Meningkatnya Persentase Kasus Pengaduan dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang tertangani	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Reviu LAKIPDA, LPPD dan Reviu Perencanaan	Dokumen	8	8	100	127,900,000	127,638,000	99.8	
		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu DAK dan Reviu PBJ	Dokumen	9	9	100	166,460,000	164,507,824	98.8	
4	Meningkatnya Kualitas Evaluasi	Pengawasan Desa	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	105	73	70	297,200,000	297,159,600	100.0	

No	SASARAN SRATEGIS	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)					KEUANGAN			Ket
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	CAPAIN (100%)	Pagu	Realisasi	CAPAIN (100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pada SAKIP Daerah	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Hasil Kerjasama Pengawasan Internal (Saber Pungli)	Dokumen	1	1	100	190,000,000	188,832,500	99.4	
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi tindaklanjut Hasil Pemeriksaan APIP, fasilitasi TPKD dan SIMHP	Dokumen	3	3	100	122,780,000	122,306,200	99.6	
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						480,434,000	372,362,100	77.5	
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pennganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Dokumen	4	4	100	120,000,000	116,595,000	97.2	
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Dokumen	12	13	108	360,434,000	255,767,100	71.0	
1	Meningkatnya tata kelola kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						357,387,845	327,902,265	91.7	
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan						95,946,000	95,041,800	99.1	
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan	Dokumen	3	3	100	62,946,000	62,660,800	99.5	

No	SASARAN SRATEGIS	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)					KEUANGAN			Ket
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	CAPAIN (100%)	Pagu	Realisasi	CAPAIN (100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri	Dokumen	3	3	100	33,000,000	32,381,000	98.1	
		Pendampingan dan Asistensi						261,441,845	232,860,465	89.1	
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	3	3	100	174,387,845	152,646,145	87.5	
			Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	1.8	60				
			Jumlah Elemen IACM yang harus dipenuhi	Level	5	5	100				
			Jumlah ASN Eselon III dan IV yang mengisi LHKASN	Orang	200	358	179				
			Jumlah Penyelenggara Negara yang mengisi LHKPN	Orang	58	58	100				
			Jumlah Dokumen Risk Register Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100				
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat daerah yang membangun RB	OPD	9	9	100	47,054,000	45,590,320	96.9	
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan MCP	Dokumen	4	4	100	40,000,000	34,624,000	86.6	

No	SASARAN STRATEGIS	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)					KEUANGAN			Ket
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	CAPAIN (100%)	Pagu	Realisasi	CAPAIN (100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laopran Penegakan Integritas	Dokumen	1	1	100	-	-	-	
Jumlah/Rata-rata							99.7	7,643,899,443	7,101,703,058	92.9	